



RENCANA STRATEGIS BIRO BINA PROGRAM 2020-2024

BADAN PUSAT STATISTIK



**RENCANA STRATEGIS
BIRO BINA PROGRAM
2020-2024**

BADAN PUSAT STATISTIK

**RENCANA STRATEGIS BIRO BINA PROGRAM
TAHUN 2020 – 2024**

No. Publikasi : 02110.2006
Katalog BPS : 1201010
Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : xii + 32 halaman

Naskah :

Bagian Penyusunan Rencana
Biro Bina Program

Gambar Kulit :

Bagian Penyusunan Rencana

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik - Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Program (Binagram) merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (Settama BPS) periode Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik, khususnya dari aspek perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

Renstra Binagram ini disusun sekaligus untuk mengakomodir dan menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Biro Binagram berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Renstra Binagram ini disusun berdasarkan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS serta agenda *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Binagram “Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel”.

Jakarta, Mei 2020

Biro Bina Program,



Atqo Mardiyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Bina Program mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program, pelaksanaan transformasi statistik, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Biro Bina Program sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama memegang peranan penting di dalam merencanakan, merumuskan, menyusun, memonitor, dan mengevaluasi aktivitas dari seluruh *Subject Matter* BPS dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS dalam mendukung pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam Pendekatan *Money Follow Program*.

Oleh karena itu penyusunan Renstra Biro Bina Program Tahun 2020 – 2024 menjadi acuan bagi perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan teknis statistik selama 2020 – 2024. Dengan terus berkembangnya kebijakan di bidang perencanaan penganggaran, tidak dipungkiri kebutuhan manajemen kinerja yang berlandaskan sistem perencanaan modern yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang lebih baik.

Visi Biro Bina Program adalah “*Tervujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel*” untuk mendukung visi Sekretariat Utama “*Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas*”. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi sebagai pendukung kegiatan teknis di bidang statistik diarahkan agar mampu memberikan pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung *good governance*, dengan memperhatikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal teknis maupun administrasi.

Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup: 1) Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan; 2) Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja; 3) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan 4) Menyelenggarakan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

Adapun sasaran kegiatan dirumuskan sebagai berikut: 1) Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu; 2) Peningkatan birokrasi yang akuntabel; 3) Terlaksananya transformasi statistik BPS; dan 4) Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS.

Biro Bina Program melaksanakan 1 (satu) Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen turunan dari program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Mengingat pentingnya peranan perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam mendukung kegiatan teknis statistik, maka Biro Bina Program menentukan strategi-strategi dengan fokus sebagai berikut: 1) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 2) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam perencanaan dan anggaran melalui Aplikasi IPlan (*Integrated Planning*) yang terintegrasi dengan aplikasi lain dalam rangka pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami; 3) Meningkatnya sistem kerja melalui kebijakan *reward and punishment* dalam rangka menciptakan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien; 4) Meningkatnya koordinasi perencanaan antar deputi, direktorat, dan daerah sehingga tercipta perencanaan yang baik dalam menunjang kegiatan statistik; dan 5) Meningkatnya kebijakan bisnis proses statistik dalam penganggaran yang diterapkan sebagai *outcome* dari pelaksanaan transformasi statistik dan reformasi birokrasi.

Selain hal teknis tersebut di atas, Biro Bina Program juga akan melakukan peningkatan penguatan SDM dan penataan kelembagaan dalam rangka mendukung terbentuknya struktur kelembagaan BPS menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *Decision Support System (DSS)*. Komitmen ini dirumuskan sebagaiantisipasi menghadapi tantangan regional maupun global pada periode lima tahun ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	2
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO BINA PROGRAM.....	9
2.1. VISI BIRO BINA PROGRAM	9
2.2. MISI BIRO BINA PROGRAM.....	9
2.3. TUJUAN BIRO BINA PROGRAM	10
2.4. SASARAN BIRO BINA PROGRAM.....	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	13
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA.....	13
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO BINA PROGRAM.....	16
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19
4.1. TARGET KINERJA	19
4.2. KERANGKA PENDANAAN	21
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Bina Program 2015 – 2019	3
Tabel 2. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Biro Bina Program 2020 – 2024.....	11
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Bina Program Tahun 2020 – 2024.....	19
Tabel 4. Alokasi Anggaran Biro Bina Program 2020 – 2024 Menurut Sasaran Kegiatan (Juta Rupiah).....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2015 – 2019 (%).....	3
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Bina Program 2020 – 2024.....	25
Lampiran 2. Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Biro Bina Program 2020 – 2024	30



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta mendukung layanan internal di Binagram. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Binagram harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengintegrasikan antara perencanaan, pendanaan dengan kinerja serta pengukuran kinerjanya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan K/L. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Biro Bina Program dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra Binagram Tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada Renstra Settama Tahun 2020 – 2024. Renstra Binagram Tahun 2020 – 2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan Renstra Settama Tahun 2020 – 2024. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan

program dan kegiatan pada lingkungan Biro Bina Program akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Pencapaian Umum Binagram Tahun 2015 – 2019

Biro Bina Program diberikan tugas, tanggung jawab dan peranan mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi terhadap program, di lingkungan BPS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Tugas dan tanggung jawab Binagram di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap program, pelaksanaan transformasi statistik, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS merupakan penegasan terhadap semangat reformasi yang menginginkan dilakukannya pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya.

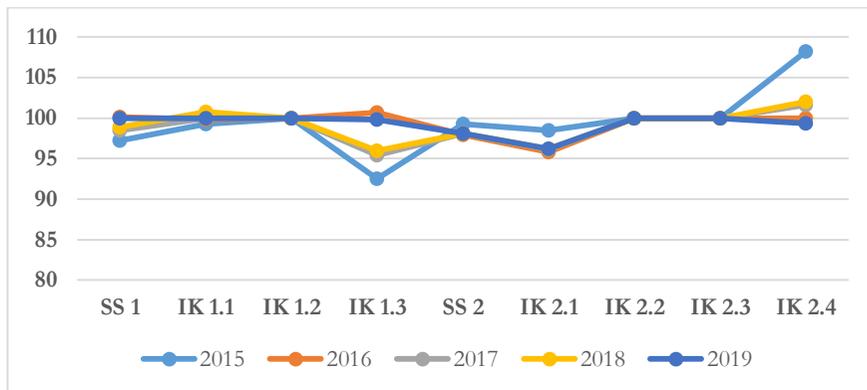
Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah terhadap setiap K/L agar memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS secara intensif, guna mencegah pemborosan sumber daya.

Capaian kinerja Binagram Tahun 2015 – 2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran selama periode Renstra Binagram 2015 – 2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang

bersangkutan. Hasil capaian kinerja Binagram Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Biro Bina Program 2015 – 2019**

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1. Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang Terpadu Tahun 2015 – 2019		97,25	100,16	98,46	98,9	99,93
1.1.	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	99,24	99,81	100	100,76	100,00
1.2.	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Persentase realisasi anggaran terhadap PAGU	92,49	100,66	95,38	95,93	99,79
SK2. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel		99,24	97,9	98,05	98,08	98,08
2.1.	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB	98,48	95,79	96,1	96,17	96,17
2.2.	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi yang terbit tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi dan STATCAP-CERDAS yang terbit tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB	108,22	99,93	101,58	101,99	99,37



Gambar 1. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2015 – 2019 (%)

Pencapaian Sasaran Terlaksananya Perencanaan Program Dan Kegiatan BPS dari Tahun 2015 – 2019 cukup berfluktuatif. Selama lima tahun, hanya di tahun 2016, BPS dapat memenuhi target kinerja, selebihnya BPS masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun demikian mulai tahun 2017 – 2019 menunjukkan tren peningkatan capaian kinerja. Dua indikator dalam Sasaran Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yaitu, Indikator Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit Tepat Waktu dan Indikator Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyusunan Renja BPS telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dan dapat memenuhi target kinerja.

Capaian Indikator Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit Tepat Waktu pada tiga tahun terakhir telah memenuhi target (Capaian kinerja \geq 100 persen). Untuk indikator Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyusunan Renja BPS sejak tahun 2015 – 2019 sudah memenuhi target dan mengikuti jadwal penyusunan rencana kerja pemerintah. Satu indikator yang masih harus ditingkatkan capaian kinerjanya adalah indikator Persentase Realisasi Anggaran terhadap PAGU. Peningkatan realisasi anggaran harus melibatkan semua pihak dan semua lini proses di BPS mulai dari perbaikan perencanaan, implementasi kegiatan dan anggaran, peran monitoring dan tindak lanjut dengan memegang prinsip efisien, efektif dan ekonomis, tidak dapat hanya dilakukan oleh Biro Bina Program.

Sejak awal periode Renstra 2015 – 2019, capaian kinerja Sasaran Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel belum dapat memenuhi target. Capaian tertinggi di tahun 2015, kemudian turun di tahun 2016. Tahun 2017 dan 2018 capaian sasaran ini meningkat walaupun peningkatannya belum sesuai dengan harapan. Satu indikator dalam Sasaran Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel yang belum dapat mencapai target kinerja selama periode Renstra adalah indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Banyak hal yang harus dibenahi oleh BPS dalam upaya peningkatan SAKIP, beberapa diantaranya adalah perbaikan IKU BPS yang lebih berorientasi pada *outcome* sehingga manfaat dari BPS dapat lebih terukur, serta penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk

seluruh pegawai BPS sebagai salah satu ukuran kinerja pegawai sebagai penjabaran IKU BPS.

Selama periode Renstra 2015 – 2019, capaian kinerja Sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS cukup berfluktuatif. Tahun 2015, capaiannya melampaui target yang ditetapkan, tetapi di tahun 2016 capaian kinerja sasaran tidak dapat memenuhi target. Kemudian di tahun 2017 dan 2018 kembali melampaui target kinerja. Sedangkan di tahun 2019, kembali belum dapat memenuhi target. Sejak tahun 2015, Indikator Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi dan STATCAP-CERDAS yang Terbit Tepat Waktu sudah dapat memenuhi target dan harus tetap dipertahankan capaiannya.

Satu indikator dalam Sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS yang belum dapat mencapai target kinerja selama periode Renstra adalah indikator Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB. Banyak hal yang harus dibenahi oleh BPS di semua area perubahan dalam upaya peningkatan Reformasi Birokrasi (RB), beberapa diantaranya adalah peningkatan kolaborasi dan sinergi antar unit kerja BPS dalam pelaksanaan bisnis proses, khususnya untuk mencapai kinerja instansi, pembuatan rencana aksi pelaksanaan RB yang mengakomodir seluruh layanan yang diberikan oleh BPS ke stakeholder terkait dengan *core business* BPS, termasuk melakukan pengukuran keberhasilannya, perencanaan kebutuhan pegawai per tahun dikaitkan dengan rencana kinerja per tahun, sehingga terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai dapat diminimalisir atau dihilangkan, serta penguatan sistem APIP ke arah konsultasi online, sehingga dapat lebih efisien dan dapat diakses oleh semua satuan kerja BPS.

1.1.2. Inovasi Binagram Tahun 2015 – 2019

1. Penyusunan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BPS
 - a) HSPK: dalam pengajuan perubahan harga satuan tidak lagi hanya berdasarkan keinginan, namun harus berdasar dan tepat sasaran. Maka diberlakukan *Standard Operational Procedure* (SOP) baru dalam perubahan rate

yaitu dengan memberikan kajian perubahan. Perubahan HSPK sendiri dibatasi hanya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan.

- b) SHBJ: entri item barang sampai level provinsi dengan *web based* dan mengurangi 1 (satu) proses, yaitu pengolahan otomatis (*Self Processing Modul*) sehingga tidak lagi dilakukan olah secara manual. Untuk SHBJ dibagi menjadi 3 (tiga) modul utama yaitu: Survei Harga Barang dan Jasa, Survei Standar Biaya, dan Survei Tarif Hotel.

2. Penyusunan Renja K/L

- a) Pengembangan Aplikasi Sistem Rencana Kerja dan Anggaran (SIREKA) menjadi IPLan memudahkan satuan kerja (satker) di daerah melakukan *input* usulan sarpras sesuai dengan jumlah pegawai dan Barang Milik Negara (BMN).
- b) Pengembangan Aplikasi IPLan dalam rangka mewujudkan penganggaran efisien dengan penambahan modul penyerapan anggaran.

3. Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program

Penggunaan dan pengembangan *Back Office* dalam rangka peningkatan sistem penganggaran.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA K/L) BPS

Input RKAKL tidak secara manual, namun menggunakan teknologi dan informasi (TI).

5. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

- a) Kompilasi Laporan Pekerjaan Pimpinan yang semula dilakukan secara manual sekarang sudah dapat dilakukan secara sistem dengan dibangunnya Aplikasi Laporan Pekerjaan Pimpinan (LPP).

- b) Laporan monitoring anggaran dan kegiatan sudah disajikan dalam bentuk infografis dan menambah cakupan.
6. Penyusunan Laporan
- a) Telah dibangunnya aplikasi *simonev* untuk menampung dokumen SAKIP dan dibuat *dashboard* per satker.
 - b) Form Rencana Aksi (FRA) Tahun 2019 sudah didesain untuk menampilkan rekap pengisian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk kemudahan entri data di Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).
 - c) Penambahan/ modifikasi konten di publikasi aktivitas.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. Potensi yang Dimiliki

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, secara umum tugas Biro Bina Program adalah melakukan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Peraturan Kepala (Perka) tersebut menjamin koordinasi dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan pada bidang pengelolaan anggaran dan kinerja baik di pusat maupun di daerah.

1.2.2. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja yang prima, akuntabel dan transparan lebih bertumpu pada permasalahan internal. Permasalahan yang menonjol adalah terbatasnya SDM yang

profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah yang membawa konsekuensi bahwa BPS harus membuka perwakilan BPS di beberapa kabupaten/ kota hasil pemekaran.

Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan informasi dan komunikasi di lingkungan Biro Bina Program belum maksimal. Koordinasi antar unit di bawah lingkungan Biro Bina Program masih belum optimal, sehingga terjadi *miscommunication* dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang mengakibatkan koordinasi diantara unit-unit di bawah Biro Bina Program berjalan kurang efisien.

Isu pokok pada Biro Bina Program saat ini meliputi:

1. Proses perencanaan dari *subject matter* sampai dengan penganggaran masih belum terintegrasi dengan baik;
2. Program, kegiatan, serta kebijakan dalam bidang statistik masih silo sehingga perlu koordinasi semua pihak; dan
3. Kemampuan dalam memantau dan evaluasi kegiatan statistik, baik kinerja dan keuangan yang belum maksimal karena informasi keuangan dan kinerja yang belum tersistem dengan baik.

Dengan adanya isu pokok tersebut di atas, diharapkan penyusunan Renstra Biro Bina Program ini mampu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kinerja seluruh bagian serta sub bagian biro bina program di seluruh Indonesia dan seluruh bagian/sub direktorat yang terkait dengan Biro Bina Program ke depan. Pada akhirnya peningkatan kinerja Biro Bina Program guna mendukung kinerja BPS dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan statistik.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO BINA PROGRAM

2.1. VISI BIRO BINA PROGRAM

Visi Biro Bina Program adalah :

“Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel”

untuk mendukung Visi Settama, yaitu : *“Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”*.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penyediaan data dan informasi serta kerangka kelembagaan yang harus ditangani. Perlu juga digarisbawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan adanya komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.

2.2. MISI BIRO BINA PROGRAM

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Bina Program yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, Misi dari Biro Bina Program dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan

4. Menyelenggarakan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

2.3. TUJUAN BIRO BINA PROGRAM

Tujuan I: Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu;

Tujuan II: Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik; dan

Tujuan III: Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS.

Tujuan pertama merupakan tugas pokok Biro Bina Program dalam menyediakan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik yang tersistem guna mendukung kelancaran kegiatan teknis di bidang statistik yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara anggaran maupun kinerjanya. Dalam hal ini Binagram dituntut untuk menyediakan suatu sistem dalam hal penganggaran yang berkualitas, menyeluruh dan terintegrasi untuk seluruh penggunaan sumberdaya yang ada di BPS guna memudahkan dalam pengendalian progres kegiatan dan penggunaan anggaran supaya dapat dipertanggungjawabkan kinerja dan kegiatannya. Selain itu Binagram dituntut untuk mengembangkan penataan kelembagaan demi terselenggaranya dan terwujudnya *good governance*. Penataan kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) termasuk mereviu perundang-undangan statistik guna mendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-undangan dan peraturan terkini demi terselenggara dan terwujudnya *good governance*.

Tujuan kedua terkait dengan peran Binagram dalam hal menyediakan anggaran BPS baik pusat maupun daerah untuk mendukung keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik.

Tujuan ketiga adalah peran Binagram dalam mengoptimalkan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang layak atau memadai untuk kelancaran kegiatan teknis di bidang statistik.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Biro Bina Program 2020 – 2024

No.	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran yang terpadu	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS	150	150	150	150	150
2.	Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB	78	80	81	82	83
3.	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	79	81	83	85	87

2.4. SASARAN BIRO BINA PROGRAM

Secara ringkas sasaran strategis Biro Bina Program dalam pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu”, adalah :
 - 1.1. Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu, dengan indikator sasaran :
 - 1.1.1. Jumlah dokumen/ laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu;

- 1.1.2. Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPS; dan
 - 1.1.3. Persentase realisasi anggaran terhadap pagu.
 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS”, adalah :
 - 2.1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel, dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB; dan
 - 2.1.2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang terbit tepat waktu.
 3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik” adalah :
 - 3.1. Terlaksananya transformasi statistik BPS, dengan indikator sasaran:
 - 3.1.1. Jumlah laporan transformasi statistik; dan
 - 3.2. Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS, dengan indikator sasaran:
 - 3.2.1. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB.



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama mengacu pada Strategi Pembangunan Statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024.

Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh Sekretariat Utama (Arah Kebijakan dan Strategi Nomor 3 dan 4), adalah:

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS; dan
- c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- a) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 jam pembelajaran (JP)/ tahun bagi setiap pegawai; dan
 - b) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a) Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- b) Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- c) Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d) Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- e) Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

Kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di lingkungan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

1. Bidang SDM;

Arah kebijakan yang akan dilakukan:

- a) Peningkatan peran Pusdiklat BPS dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; dan
- b) Peningkatan peran biro kepegawaian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Strategi yang akan dilakukan:

- a) Penyusunan *knowledge management* bagi insan BPS;
- b) Penyelenggaraan *capacity building* bagi internal BPS terkait *soft skill* pegawai;
- c) Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai BPS;

- d) Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
- e) Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
- f) Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
- g) Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;
- h) Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional;
- i) Evaluasi struktur organisasi bagian jabatan fungsional; dan
- j) Menyesuaikan standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan IT professional).

2. Bidang Layanan Manajemen;

Arah kebijakan yang dilakukan:

- a) Peningkatan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang *agile*; dan
- b) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Strategi yang akan dilakukan:

- a) Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi;
- b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja institusi dan pegawai;
- c) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- d) Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Settama guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran;
- e) Mereviu dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada GSBPM dalam kerangka

pelaksanaan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS);

- f) Merumuskan *grand design smart office*; dan
- g) Implementasi *smart office* di BPS.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO BINA PROGRAM

Arah kebijakan penyelenggaraan Biro Bina Program diturunkan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Sekretariat Sestama. Fokus arah kebijakan dan strategi Biro Bina Program Tahun 2020 – 2024 yang selaras dengan arah kebijakan sekretariat utama terkait Bidang Layanan Manajemen, sebagai berikut:

1. Peningkatan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang *agile*; dan
2. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Sedangkan strategi yang menjadi fokus diterapkan di lingkungan Biro Bina Program adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; dan
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Sestama guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran.

Sehingga dari arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama 2020 – 2024 tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi Biro Bina Program 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan sekretariat utama peningkatan maturitas sistem, diturunkan menjadi arah kebijakan biro bina program dalam peningkatan penggunaan sistem aplikasi. Arah kebijakan ini dilakukan dengan strategi sekretariat utama pengembangan dan integrasi sistem yang akan diselaraskan dengan strategi biro bina program sebagai berikut:

- a) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan
 - b) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam perencanaan dan anggaran melalui I-Plan yang terintegrasi dengan aplikasi lain dalam rangka pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami.
2. Arah kebijakan sekretariat utama penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, diturunkan menjadi arah kebijakan biro bina program dalam peningkatan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan strategi sekretariat utama kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah yang akan diselaraskan dengan strategi biro bina program sebagai berikut:
- a) Meningkatnya sistem kerja melalui kebijakan *reward and punishment* dalam rangka menciptakan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien;
 - b) Meningkatnya koordinasi perencanaan antar deputy, direktorat, dan daerah sehingga tercipta perencanaan yang baik dalam menunjang kegiatan statistik; dan
 - c) Meningkatnya kebijakan bisnis proses statistik dalam penganggaran yang diterapkan sebagai *outcome* dari pelaksanaan transformasi statistik dan reformasi birokrasi.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Utama adalah 1 (satu) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen, dari program tersebut kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Settama dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

Kegiatan yang diampu oleh Biro Bina Program yaitu Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon III di lingkungan Biro Bina

Program dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Komponen tersebut antara lain:

1. *Business Process Re-Engineering*;
2. Pembangunan Sistem dan Aplikasi Statistik;
3. Transformasi SDM;
4. Manajemen Perubahan dan *Capacity Building*;
5. Penyusunan Rencana Kerja;
6. Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi;
7. Penyusunan Laporan; dan
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional PPN/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020 – 2024, target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Biro Bina Program 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Biro Bina Program untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020 – 2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Biro Bina Program dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Biro Bina Program 2020 – 2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Bina Program Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Menyelenggarakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Terpadu							
	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan dan	526	526	526	526	526	Bagian Penyusunan Rencana dan Penyusunan Anggaran

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Penganggaran yang terbit tepat waktu						
		Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS	150	150	150	150	150	Bagian Penyusunan Rencana dan Penyusunan Anggaran
		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	95	95	95	95	95	Bagian Penyusunan Anggaran
2	Meningkatnya Pemanfaatan Dan Peningkatan Teknologi Dalam Upaya Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Anggaran Maupun Kinerja Di Seluruh Satker BPS							
	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	78	79	80	81	82	Bagian Monitoring dan Evaluasi
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang terbit tepat waktu	18	18	18	18	18	Bagian Monitoring dan Evaluasi
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Koordinasi Dan Sinkronisasi Program, Kebijakan Serta Kegiatan Dalam Bidang Statistik							
	Terlaksananya transformasi statistik BPS	Jumlah laporan transformasi statistik	78	80	81	82	83	Bagian Transformasi Statistik
	Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	79	80	81	82	83	Bagian Transformasi Statistik, Penyusunan Rencana, dan Monitoring dan Evaluasi

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Biro Bina Program akan menjalankan 1

(satu) program generik dan 1 (satu) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Biro Bina Program dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:

Kegiatan 2881 : Biro Bina Program (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran), dengan sasaran kegiatan:

1. Terlaksananya Transformasi Statistik BPS, dengan indikator:
 - a) Laporan Transformasi Statistik.
2. Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu, dengan indikator:
 - a) Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan reformasi birokrasi yang terbit tepat waktu.
 - b) Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS.
 - c) Persentase realisasi anggaran terhadap Pagu.
3. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel, dengan indikator:
 - a) Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB.
 - b) Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi yang terbit tepat waktu.
4. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS, dengan indikator:
 - a) Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Biro Bina Program. Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Bina Program tertuang dalam Dokumen Renstra Biro Bina Program Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Bina

Program selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Biro Bina Program 2020 – 2024 Menurut Sasaran Kegiatan (Juta Rupiah)

Program/Kegiatan		Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
054.01.01 Program Dukungan Manajemen		2.963.574	3.358.753	3.548.706	3.553.700	3.743.596
Kegiatan 2881: Biro Bina Program (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran)		54.758	100.270	103.779	107.412	111.171
I	Terlaksananya Transformasi Statistik BPS	44.003,7	83.662,9	86.591,1	89.621,8	92.758,5
II	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu	8.363,0	12.146,5	12.571,6	13.011,6	13.467,1
III	Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	500,8	870,0	900,5	932,0	964,6
IV	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS	1.890,4	3.590,5	3.716,2	3.846,3	3.980,9
Total		54.758	100.270	103.779	107.412	111.171



BAB V PENUTUP

Mengingat pentingnya pelayanan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan dalam mendukung operasional teknis pembangunan Statistik di BPS, maka Biro Bina Program menentukan strategi-strategi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang ada agar efektif dan efisien sehingga tujuan BPS dalam mendukung program pemerintah yang *good governance* dapat diwujudkan.

Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan, dan pengendalian sumberdaya yang ada agar efektif dan efisien dilakukan dengan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi, meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM secara proporsional dan akuntabel serta menata ulang kelembagaan dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*.

Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Bina Program 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								7.927.525,46	5.723.563,00	5.242.998,28	7.613.515,70	4.980.116,79	
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Kedeputian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, NAS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)		25	30	35	40	45						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)		70	74	78	82	86						
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Kedeputian MIS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)		25	30	35	40	45							
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)		60	64	68	72	76							
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Kedeputian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, MIS, NAS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)		30	34	38	42	46							
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Instama dan Sekretariat Utama
	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		97	97	98	99	99							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen								2.973.171,6	3.368.686,0	3.558.987,5	3.564.340,4	3.754.610,7	
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)		80	80	80	80	80						
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)		30	32	34	36	38						
	Progress Pengembangan jabatan fungsional baru (%)			25	50	75	100						
	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB		78	80	81	82	83						
	Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB		79	81	83	85	87						
	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		97	97	98	99	99						
	Jumlah satker yang menerapkan smart office				2	4	6						
	Dokumen grand design smart office			50	100	100	100						
KEGIATAN 2881 : Biro Bina Program (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran)													Biro Bina Program
Terlaksananya Transformasi Statistik BPS			1	1	1	1	1	44.003,7	83.662,9	86.591,1	89.621,8	92.758,5	
	Laporan Transformasi Statistik		1	1	1	1	1						
Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu			1	1	1	1	1	8.363,0	12.146,5	12.571,6	13.011,6	13.467,1	
	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan reformasi birokrasi yang terbit tepat waktu		526	526	526	526	526						
	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS		150	150	150	150	150						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase realisasi anggaran terhadap Pagu (%)		95	95	95	95	95							
	Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel		1	1	1	1	1	500,8	870,0	900,5	932,0	964,6		
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB		78	78	78	78	78							
	Jumlah Laporan Monitoring, dan Evaluasi yang terbit tepat waktu		18	18	18	18	18							
	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS		1	1	1	1	1	1.890,4	3.590,5	3.716,2	3.846,3	3.980,9		
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB		76	76	76	76	76							

Lampiran 2. Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Biro Bina Program 2020 – 2024

Kegiatan/Komponen/Sub Komponen		Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2881	Penyusunan, Pengembangan, Dan Evaluasi Program Dan Anggaran	49.748.115.000	36.799.949.000	25.911.612.000	23.995.317.000	20.962.627.000
	Laporan Transformasi Statistik	41.150.807.000	27.991.571.000	16.794.943.000	13.995.786.000	11.196.628.000
	051-BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING	8.184.039.000	4.505.242.000	2.703.145.000	2.252.621.000	1.802.097.000
	052-PEMBANGUNAN SISTEM DAN APLIKASI STATISTIK	24.077.520.000	10.749.104.000	6.449.462.000	5.374.552.000	4.299.642.000
	053-TRANSFORMASI SDM	1.289.249.000	1.042.156.000	625.294.000	521.078.000	416.862.000
	054-MANAJEMEN PERUBAHAN DAN CAPACITY BUILDING	7.599.999	11.695.069.000	7.017.041.000	5.847.535.000	4.678.028.000
	Dokumen/Laporan Perencanaan Dan Penganggaran	6.368.337.000	7.358.004.000	7.615.532.000	8.445.855.000	8.157.943.000
	051 – PENYUSUNAN RENCANA KERJA	6.368.337.000	7.358.004.000	7.615.532.000	8.445.855.000	8.157.943.000
	A. Penyusunan SHBJ dan HSPK BPS	829.252.000	351.156.000	363.446.000	376.166.000	389.331.000
	B. Penyusunan Renja K/L	267.600.000	391.826.000	405.539.000	419.732.000	434.422.000
	C. Network Planning ST2023/SE2026	508.500.000			563.782.000	

Kegiatan/Komponen/Sub Komponen		Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	D. Penyusunan Anggaran (Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program)	3.504.168.000	5.001.207.000	5.176.249.000	5.357.417.000	5.544.926.000
	E. Penyusunan Anggaran (Penyusunan RKAKL BPS)	1.258.817.000	1.613.815.000	1.670.298.000	1.728.758.000	1.789.264.000
	Laporan Monitoring, dan Evaluasi	422.421.000	446.013.000	461.623.000	477.780.000	494.503.000
	051 – PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	140.012.000	164.946.000	170.719.000	176.694.000	182.879.000
	070 - PENYUSUNAN LAPORAN	282.409.000	281.067.000	290.904.000	301.086.000	311.624.000
	Laporan Reformasi Birokrasi	1.806.550.000	1.004.361.000	1.039.514.000	1.075.897.000	1.113.553.000
	051-PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	1.1806.550.000	11.004.361.000	1.039.514.000	1.075.897.000	1.113.553.000



**BIRO BINA PROGRAM
BADAN PUSAT STATISTIK**